

ANALISIS TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT KARYA SULAWESI UTARA

Keydi Tangian¹, Pantji Sintje Alouw², Jufri Rompas³

^{1,2,3}Politeknik Manado

Email : tangiankeydi@gmail.com

Abstract

In order to prevent future penalties, this study attempts to examine how PT. Karya Sulawesi Utara is implementing its income tax Article 21 tax duties. It will show whether the business has complied with its tax obligations in line with the relevant laws by employing a tax review technique. The research was conducted at PT Karya Sulawesi Utara using qualitative methods with primary and secondary data sources involving interviews, observations, and documentation of payslip documents, deduction reports, deposits, and tax reporting of permanent employees during the year 2024. The analysis results indicate that the company has implemented the Tax Expenditure Report (TER) in accordance with applicable regulations, but there are still minor errors found in reporting and calculations that could potentially lead to tax risks. Tax reviews have proven to be an important evaluation tool in identifying discrepancies and enhancing tax compliance. By carrying out tax reviews regularly, the company can minimize potential tax sanctions and ensure that its tax obligations are in accordance with Law Number 36 of 2008 and Government Regulation Number 58 of 2023. Researchers advise companies to use the actual PTKP based on the employee's status, and to further improve compliance in paying taxes to ensure they are submitted before the predetermined deadline.

Keywords: Tax Review, Income Tax Article 21, Average Effective Rate

Abstrak

Untuk mencegah penalti di masa mendatang, studi ini mencoba untuk mengkaji bagaimana PT. Karya Sulawesi Utara melaksanakan kewajiban pajak penghasilan pasal 21. Studi ini akan menunjukkan apakah perusahaan telah mematuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang yang relevan dengan menggunakan teknik tinjauan pajak. Penelitian dilaksanakan di PT Karya Sulawesi Utara dengan menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap dokumen slip gaji, laporan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak karyawan tetap selama tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan TER sesuai peraturan yang berlaku, namun masih ditemukan kekeliruan kecil dalam pelaporan dan perhitungan yang berpotensi menimbulkan risiko perpajakan. Tax review terbukti menjadi alat evaluasi yang penting dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan pelaksanaan tax review, perusahaan dapat meminimalkan potensi sanksi perpajakan serta memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 58 Tahun 2023. Peneliti memberikan saran kepada perusahaan agar perusahaan menggunakan PTKP yang sebenarnya yaitu dari status pegawai itu sendiri, dan lebih ditingkatkan lagi kepatuhan dalam membayar pajak agar bisa disetorkan sebelum batas waktu yang sudah ditentukan.

Kata-kata Kunci: Tax Review, Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan terbesar Indonesia adalah pajak, pajak berperan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan dana dari pajak melalui APBN dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga memperkuat perekonomian Indonesia. Agar negara dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, pajak yaitu kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan di bawah paksaan sesuai dengan hukum tanpa menerima imbalan langsung. Pendapatan adalah suatu item yang dikenakan pajak. Pendapatan adalah setiap kemampuan ekonomi tambahan yang diperoleh atau didapatkan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, dan yang dapat mereka gunakan untuk membangun kekayaan mereka.

Bisnis yang akan menjadi fokus studi ini yaitu PT Karya Sulawesi Utara. PT Karya Sulawesi Utara didirikan di kota Manado Sulawesi Utara pada tanggal 20 Oktober 2010. PT Karya Sulawesi Utara ini menjalankan usaha di bidang konstruksi dengan menjalankan usaha di bidang pembangunan, kontraktor, beroperasi disektor perdagangan umum, yang mencangkup perdagangan lokal, grosir, pemasok, distributor, serta ekspor dan impor. Perdagangan antar pulau menjalankan usaha di bidang perindustrian, perbengkelan, pertanian, percetakan serta menjalankan usaha dalam arti seluas-luasnya yang dapat menguntungkan bagi perusahaan. Pada tanggal 27 Desember 2023 pemerintah pemerintah menerbitkan peraturan baru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2024, membahas tarif pemotongan pajak penghasilan berdasarkan pasal 21 yang berkaitan dengan pekerjaan, layanan, atau kegiatan wajib pajak individu. Agar pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, diperkirakan bahwa kebijakan ini akan mengurangi biaya bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dan menawarkan kepastian hukum bagi kedua pihak yang memotong pajak dan wajib pajak sebagai pihak yang pajaknya dipotong dari penghasilannya. (Ananda & Dewi, 2024). PT Karya Sulawesi Utara sudah memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyesuaikan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai/karyawan tetap dengan menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Oleh karena itu, peneliti sangat ingin melaksanakan penelitian *TaxReview* pada perusahaan PT Karya Sulawesi Utara untuk menjamin bahwa kewajiban pajak dipenuhi dengan akurat dan mencegah sanksi di masa depan. Studi ini akan menilai kewajiban pajak PT Karya Sulawesi Utara dengan penerapan *Taxreview*. *Taxreview* akan membuktikan apakah PT Karya Sulawesi Utara adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban terkait pajak mereka dengan menyetor atau melaporkan pajak sesuai dengan aturan yang relevan atau tidak.

LANDASAN TEORI

1. Definisi Pajak

Berdasarkan hukum umum dan proses perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh dari penghasilan pajak. Pemerintah dapat mengelola inflasi dengan menerapkan langkah-langkah stabilitas harga dengan uang yang diterima dari pajak. Semua kepentingan publik negara, termasuk pembangunan untuk

menciptakan peluang kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, akan didanai oleh pajak yang dipungut negara.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan adalah bentuk pajak subjektif, Menurut Hendrawan Hendrawan dkk., 2024, di mana kewajiban pajak terkait dengan wajib pajak individu dan tidak dimaksudkan untuk dialihkan kepada wajib pajak lain. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak dikenal sebagai pajak penghasilan.

Amandemen keempat terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang pajak penghasilan tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, yang menjadi dasar hukum untuk pajak penghasilan. Penghasilan adalah subjek perpajakan. Penghasilan adalah setiap peningkatan potensi ekonomi wajib pajak yang mereka terima atau peroleh, baik dari Indonesia maupun dari tempat lain, dan yang dapat mereka gunakan untuk konsumsi sendiri atau untuk membangun kekayaan mereka dengan cara apapun.

Pada 27 Desember 2023, Jakarta mengesahkan (Peraturan pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2023) dan menetapkan tarif pemotongan pajak penghasilan berdasarkan pasal 21 atas pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan, layanan, atau kegiatan wajib pajak individu. Tanggal efektif peraturan ini adalah 1 Januari 2024. Dalam periode pajak selain yang terbaru, atau secara bulanan atau harian, skema tarif pajak efektif rata-rata digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21. Untuk mencapai proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel, tarif rata-rata, atau TER, diperkirakan akan mempermudah wajib pajak dalam menghitung pemotongan pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, dan mempermudah pengembangan sistem administrasi perpajakan yang dapat memvalidasi perhitungan wajib pajak.

3. Tax Review

Taxreview adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek kewajiban perpajakan di suatu perusahaan. Proses ini meliputi pemeriksaan terhadap catatan pajak, perhitungan pajak, dan penerapan peraturan perpajakan yang berlaku. Memeriksa dan menilai apakah perusahaan telah mematuhi kewajiban pajaknya sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku adalah salah satu aspek dari kegiatan tinjauan pajak. (Widyawati & Sudiana, 2022). Jadi tujuan utama dari taxreview adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan benar dan untuk mengidentifikasi potensi resiko pajak di masa yang akan datang seperti terhindar dari denda, meningkatkan efisiensi pajak, dan menjaga reputasi perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penanganan Pajak penghasilan pasal 21 oleh PT Karya Sulawesi Utara diperiksa menggunakan metodologi studi kualitatif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi seperti catatan penggajian, informasi pajak karyawan, dan informasi bisnis umum digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT Karya Sulawesi Utara yang berlokasi di Manado, tepatnya di Jalan Sea No. III Lingkungan V, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Sumber data penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data ini bisa didapatkan secara langsung dari hasil wawancara atau melalui survei lapangan yang akan dilakukan oleh peneliti di PT Karya Sulawesi Utara. Strategi untuk analisis data metode Kualitatif ini dengan maksud untuk mengevaluasi kepatuhan pajak, mengidentifikasi potensi kesalahan, serta memastikan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan berdasarkan pasal 21 pada PT Karya Sulawesi Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan PPh Pasal 21 PT Karya Sulawesi Utara

Berikut adalah daftar nama, status PTKP, dan gaji pokok karyawan PT Karya Sulawesi Utara yang berjumlah 15 karyawan.

Tabel 1. Daftar gaji karyawan PT Karya Sulawesi Utara

No	Nama	Status PTKP	Gaji Pokok	Gaji pokok Per Tahun
1.	Pamela	TK/0	6.784.810	81.417.720
2.	Maidy	TK/0	6.515.151	78.181.812
3.	Herman	TK/0	3.485.000	41.820.000
4.	Rewin	TK/0	3.485.000	41.820.000
5.	Nizar	TK/0	3.485.000	41.820.000
6.	Septianus	TK/0	3.485.000	41.820.000
7.	Shadevo	TK/0	3.485.000	41.820.000
8.	Faldo	K/1	3.485.000	41.820.000
9.	Novan	K/1	3.485.000	41.820.000
10.	Nindy	TK/0	3.485.000	41.820.000
11.	Citra	TK/0	3.485.000	41.820.000
12.	Diah	TK/0	3.485.000	41.820.000
13.	Ryan	K/1	5.000.000	60.000.000
14.	Moris	K/1	5.000.000	60.000.000
15.	Hizkia	K/2	5.000.000	60.000.000
TOTAL			63.149.961	757.799.532

Sumber : PT Karya Sulawesi Utara (2025)

Selanjutnya perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 PT Karya Sulawesi Utara dalam hal ini penulis menggunakan estimasi gaji pegawai tahun 2024 untuk pajak penghasilan pasal 21 yang mencangkup daftar 15 pegawai digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 menggunakan tarif pajak progresif.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan PT Karya Sulawesi Utara

No	Nama	Status	Gaji Pokok	Penghasilan Bruto/Bulan	Kategori TER	Tarif	PPh 21/Bulan
1.	Pamela	TK/0	6.784.810	6.784.810	TER A	1,25%	84.810
2.	Maidy	TK/0	6.515.151	6.515.151	TER A	1%	65.152
3.	Herman	TK/0	3.485.000	3.485.000	TER A	0%	-
4.	Rewin	TK/0	3.485.000	3.485.000	TER A	0%	-
5.	Nizar	TK/0	3.485.000	3.485.000	TER A	0%	-
6.	Septianus	TK/0	3.485.000	3.485.000	TER A	0%	-
7.	Shadevo	TK/0	3.485.000	3.485.000	TER A	0%	-
8.	Faldo	TK/0	3.485.000	3.485.000	TER A	0%	-
9.	Novan	TK/0	3.485.000	3.485.000	TER A	0%	-
10.	Nindy	TK/0	3.485.000	3.485.000	TER A	0%	-
11.	Citra	TK/0	3.485.000	3.485.000	TER A	0%	-
12.	Diah	TK/0	3.485.000	3.485.000	TER A	0%	-
13.	Ryan	TK/0	5.000.000	5.000.000	TER A	0%	-
14.	Moris	TK/0	5.000.000	5.000.000	TER A	0%	-
15.	Hizkia	TK/0	5.000.000	5.000.000	TER A	0%	-
							149.962

Sumber : Data Diolah (2025)

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Bulan desember 2024

No	Nama	Gaji Pokok/Tahun	Penghasilan Bruto/Tahun	Biaya Jabatan 5%	Penghasilan Neto/Tahun	PTKP	PKP	Tarif	PPh 21 Terutang
1.	Pamela	81.417.000	81.417.000	4.070.886	77.346.834	54.000.000	23.346.000	5%	1.167.300
2.	Maidy	78.181.812	78.181.812	3.909.090	74.272.722	54.000.000	20.272.000	5%	1.013.600
3.	Herman	41.820.000	41.820.000	2.216.000	42.104.000	54.000.000	-	-	-
4.	Rewin	41.820.000	41.820.000	2.216.000	42.104.000	54.000.000	-	-	-
5.	Nizar	41.820.000	41.820.000	2.216.000	42.104.000	54.000.000	-	-	-
6.	Septianus	41.820.000	41.820.000	2.216.000	42.104.000	54.000.000	-	-	-
7.	Shadevo	41.820.000	41.820.000	2.216.000	42.104.000	54.000.000	-	-	-
8.	Faldo	41.820.000	41.820.000	2.216.000	42.104.000	54.000.000	-	-	-
9.	Novan	41.820.000	41.820.000	2.216.000	42.104.000	54.000.000	-	-	-
10.	Nindy	41.820.000	41.820.000	2.216.000	42.104.000	54.000.000	-	-	-
11.	Citra	41.820.000	41.820.000	2.216.000	42.104.000	54.000.000	-	-	-
12.	Diah	41.820.000	41.820.000	2.216.000	42.104.000	54.000.000	-	-	-
13.	Ryan	60.000.000	60.000.000	3.125.000	59.375.000	54.000.000	-	-	-
14.	Moris	60.000.000	60.000.000	3.125.000	59.375.000	54.000.000	-	-	-
15.	Hizkia	60.000.000	60.000.000	3.125.000	59.375.000	54.000.000	-	-	-
		757.799.532	757.799.532		719.909.555				2.180.900

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 pada bulan januari sampai bulan Desember maka :

PPh Pasal 21 terutang pada Tahun 2024 PT Karya Sulawesi Utara	= Rp 2.180.900
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong pada masa Jan-Nov 149.962 x 11	= Rp 1.649.582
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan desember	= Rp 531.318

2. Penyetoran PPh Pasal 21 PT Karya Sulawesi Utara

Tabel 4. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Bulan	Tanggal Penyetoran
Januari	20-02-2024
Februari	20-03-2024
Maret	20-04-2024
April	20-05-2024
Mei	05-07-2024
Juni	05-07-2024
Juli	06-08-2024
Agustus	05-09-2024
September	14-10-2024
Okttober	08-11-2024
November	09-12-2024
Desember	12-02-2025

Sumber : Data Diolah (2025)

Sebelum melakukan penyampaian SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Karya Sulawesi Utara terlebih dahulu melakukan pembayaran pajak. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Karya Sulawesi Utara sudah sesuai dengan menggunakan E-Billing system. E-Billing system merupakan proses membayar pajak yang dilakukan secara elektronik menggunakan kode E-Billing. Setelah mencetak kode E-Billing lalu digunakan sebagai kode pembayaran pajak dan bisa dibayarkan secara online lewat

bank ataupun melalui internet banking. Batas pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode pajak berakhir.

Berdasarkan data diatas PT Karya Sulawesi Utara terlambat menyetorkan pajak yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan bulan September. Artinya PT Karya Sulawesi Utara belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

3. Pelaporan PPh Pasal 21 PT Karya Sulawesi Utara

Tabel 5. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Bulan	Tanggal Pelaporan
Januari	20-02-2024
Februari	20-03-2024
Maret	20-04-2024
April	20-05-2024
Mei	05-07-2024
Juni	05-07-2024
Juli	06-08-2024
Agustus	05-09-2024
September	14-10-2024
Oktober	09-11-2024
November	09-12-2024
Desember	12-02-2025

Sumber : Data diolah (2025)

PT Karya Sulawesi Utara kini menggunakan sistem DJP Online untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Laporan pajak penghasilan pasal 21 bulanan harus diselesaikan selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhirnya periode pajak; jika batas akhir jatuh pada hari libur nasional, laporan dapat diselesaikan pada hari kerja berikutnya. Surat pemberitahuan (SPT) dan bukti pembayaran pajak adalah dokumentasi yang dibutuhkan untuk menyerahkan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan yang pajaknya dipotong dan dibayarkan. Berdasarkan informasi tersebut diatas, PT Karya Sulawesi Utara telah sepenuhnya mengikuti aturan yang terkait dengan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, terbukti dengan fakta bahwa perusahaan tersebut tidak pernah terlambat dalam mengajukan laporan pajaknya antara januari dan desember.

4. Tax review Pajak Penghasilan pasal 21 Pada PT Karya Sulawesi Utara

Tabel 6. Hasil Tax Review

Keterangan	PT Karya Sulawesi Utara berdasarkan bukti potong & SPT	Hasil Analisis Berdasarkan teori	Kesimpulan
1. Menentukan penghasilan bruto	PT Karya Sulawesi Utara tidak memiliki tunjangan dan bonus jadi gaji pokok adalah penghasilan bruto nya juga	Semua penghasilan di hitung untuk bisa mendapatkan penghasilan brutonya.	Sudah sesuai
2. Menentukan besarnya penghasilan Neto setahun dan biaya jabatan	penghasilan bruto/tahun dikalikan dengan 5% itulah biaya jabatan penghasilan neto/tahun didapatkan setelah dikurangkan dengan biaya jabatan.	Biaya jabatan bulanan dan tahunan maksimal masing-masing 500.000 dan 6.000.000 dikurangi tarif 5% dari pendapatan kotor	Sudah sesuai
3. Menentukan besarnya PTKP	PT. Karya Sulawesi saat memotong pajak semua karyawan dipotong dengan PTKP K/0	Terdapat 5 orang karyawan dengan status PTKP selain TK/0 yaitu : 1. Faldo K/1 2. Novan K/1 3. Ryan K/1 4. Moris K/1 5. Hizlia K/2	Belum Sesuai Karena PT Karya Sulawesi Utara hanya mencatat PTKP yang sebenarnya dan pada saat pemotongan tidak menggunakan PTKP yang sebenarnya yaitu dari status pegawainya sendiri.
4. Menentukan kategori (TER) dan besarnya Tarif yang dipotong	- Pamela penghasilan bruto per bulan 6.784.810 TER kategori A, dengan Tarif 1,25% - Maidy penghasilan bruto perbulan 6.515.515 TER Kategori A, Dengan tarif 1%	- Pamela penghasilan bruto per bulan 6.784.810 TER kategori A, dengan tarif 1,25 % - Maidy penghasilan bruto perbulan 6.515.515 TER Kategori A, Dengan tarif 1%	Sudah sesuai

5. Menentukan besarnya PKP	PKP bagi pegawai penghasilan bruto dikurangi biaya yang terkait dengan pekerjaan, PTKP yang diperoleh selama periode satu tahun, atau jumlah tahunan.	Total pendapatan kotor setelah pengeluaran dikurangi adalah pendapatan bulanan karyawan tetap yang dikenakan pajak.	Telah sesuai
6. Menentukan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan menggunakan tarif pajak progresif di bulan Desember	PKP pegawai PT Karya Sulawesi Utara - Pamela $23.346.000 \times 5\% = 1.167.300$ - Maidy $20.272.000 \times 5\% = 1.013.600$	- 0 – 60jt tarif 5% - Diatas 60jt – 250jt tarif 15% - Diatas 250jt – 500jt tarif 25% - Diatas 500jt – 5M tarif 30% - Diatas 5M tarif 35%	Sudah sesuai
7. Pembayaran Pajak	PT. Karya Sulawesi Utara menggunakan teknologi E-Billing Untuk membayar pajak penghasilan pasal 21. Setelah mencetak kode E-Billing lalu digunakan sebagai kode pembayaran pajak dan bisa dibayarkan secara online lewat bank ataupun melalui internet banking. Perusahaan sudah membayar pajak setiap bulan selama Tahun 2024.	Pembayaran pajak pada bulan Januari, februari, Maret, April, September dan Desember terlambat dibayarkan yaitu di atas tanggal 10 bulan berikutnya.	Belum sesuai. PT karya Sulawesi utara sudah membayar menggunakan E-Billing System akan tetapi pada bulan Januari, Februari, Maret, Apri, September & Desember PT Karya Sulawesi Utara terlambat membayar Pajak.
8. melaporan Pajak	Pelaporan pajak dilakukan melalui web.site DJP Online, dan dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir dan 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.	Melaporan pajak paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dan 3 bulan untuk masa pajak tahunan. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan melalui web.site DJP Online.	Sudah sesuai

Sumber : Data Diolah (2025)

KESIMPULAN

Mengacu pada analisis pemeriksaan pajak atas penghasilan pasal 21 pada PT karya Sulawesi Utara yang telah dilakukan dalam penelitian ini, hasil dapat ditemukan Menurut tinjauan penulis tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Karya Sulawesi Utara di temukan bahwa pelaksanaan perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang relevan, khususnya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dan Undang-undang HPP No 7 tahun 2021. Selain itu, masih ada beberapa kesalahan dalam menentukan PTKP dan membayar pajak, PT Karya Sulawesi Utara tidak mematuhi Undang-Undang yang berlaku pada saat pembayaran. PT Karya Sulawesi Utara wajib mematuhi status PTKP karyawan-karyawannya, dan Artikel 21 dari Pajak penghasilan dibayar pada tanggal sepuluh bulan berikutnya, pada saat pelaporan PPh Pasal 21 PT Karya sulawesi utara telah melaporkan sebelum tenggat waktu, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode pajak selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Avira Silvia, Armein Early, Dwiaستutiningsih Rini, Khotimah Nurul, Renny, Usman Susanti, Khadijah Eva, Ardiansyah Irfan, Utomo Ely Sapto, Indrayani Emmy, Noversyah, Perdama Endika, & Pratiwi Erny. (2024). Pelatihan Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. *Jurnal Pengabdian Masyarakat bangsa*, 1738–1743.
- HendrawanHendrawan, Putri Awalina, & Agus Athori. (2024). Analisis Penerapan Tax Planning PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 254–264. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.783>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. (2023, Desember 27). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023>
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021, Oktober 29). Database Peraturan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 . (2008, September 23). Direktorat Jendral Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>
- Widyawati, K., & Sudiana, I. W. (2022). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan PT. First Health Enterprises Pada Tahun 2019. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 237–248.